



Dengan alat peraga sederhana, guru membantu murid memahami suku kata dengan cara yang menyenangkan. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mengoptimalkan Kesetaraan, Inklusi, dan Respons Perubahan Iklim di Lingkungan Belajar Kabupaten Seram Bagian Barat

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Seram Bagian Barat: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Seram Bagian Barat menguasai kemampuan dasar dengan cukup baik. Namun, murid perempuan memiliki capaian lebih tinggi dari murid laki-laki. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal melibatkan semua lapisan masyarakat.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan, serta (5) memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 46,74; perempuan 49,21

Numerasi : Laki-laki 33,95; perempuan 36,99

Masing-masing skor tersebut lebih tinggi sekitar 1-4 poin dari nilai rata-rata provinsi. Namun, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Mei 2025. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 2-4 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Beberapa guru masih memberikan hukuman verbal dan fisik pada murid, seperti mencubit dan memukul. Kekerasan seksual pun dianggap sebagai aib yang membuat malu keluarga, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan murid korban kekerasan hanya dipindahkan ke sekolah lain. Kebiasaan ini dapat berdampak pada motivasi, konsentrasi, dan proses belajar murid serta kepercayaan diri mereka.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 558 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 24% tidak sekolah dan 76% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (41%), sekolah inklusi (20%), atau sekolah luar biasa/SLB (15%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan tenaga pendukung (guru pendamping, dokter, terapis, dan psikolog) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali tidak didaftarkan ke sekolah dan dikucilkan.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid di daerah terpencil, murid harus bekerja untuk membiayai pendidikan adik-adiknya, murid terlibat dalam perkawinan anak, murid korban kekerasan, serta murid belum bisa berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 159,51 dari 250. Angka tersebut lebih rendah dari indeks Maluku (160,03), tetapi di atas indeks Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, kabupaten ini berisiko tinggi mengalami banjir dan tanah longsor.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti penanaman bakau dan pengolahan sampah menjadi kompos. Sekolah pun sudah memperkenalkan dan membiasakan perilaku ramah lingkungan pada murid. Namun, kurangnya kolaborasi antarpemangku kepentingan membuat langkah ini belum berjalan efektif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpencilan, gender, dan disabilitas—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Risiko daerah terpencil

Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil harus menghadapi jarak yang jauh, biaya yang mahal, dan risiko bencana untuk mengakses pendidikan, sehingga mereka seringkali putus sekolah dan membantu orang tua bekerja.



Seorang guru sedang mendampingi muridnya memahami konteks bencana alam melalui buku pelajaran. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi program pencegahan kekerasan (pendidikan karakter dan tindakan disiplin positif), mengawasi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.
2. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan kepada orang tua murid secara berkala, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui jalur komunikasi digital. Langkah ini bertujuan meningkatkan keterlibatan, pengawasan, dan perlindungan orang tua dalam proses belajar dan tumbuh kembang murid.
3. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah agar sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan dapat mengakomodasi kebutuhan murid.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengupayakan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pendidikan inklusif—sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak (AYL) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Regulasi ini bertujuan menetapkan perencanaan, pendanaan, dan tanggung jawab sekolah dalam memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard* Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Memperkuat kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan (seperti penanaman bakau, pengolahan sampah menjadi kompos, dan larangan penebangan liar), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital. Dengan begitu, kebijakan dan program tersebut bisa dipahami masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku mereka.
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mensosialisasikan skema evakuasi bencana dan meningkatkan respons terhadap bencana di sekolah.



Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda: Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penerapan kebijakan dan pemberian dukungan (terutama bagi murid penyandang disabilitas, murid korban kekerasan, murid dari keluarga miskin, dan murid di daerah terpencil) dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran